

Judul : Interpelasi Hambalang Tunggu Usulan Resmi
Tanggal : Rabu, 21 November 2012
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Interpelasi Hambalang Tunggu Usulan Resmi

JAKARTA - Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR agar interpelasi belum ada tidak lanjut secara konkret. Hingga saat ini belum satu pun anggota DPR yang menjadi inisiator, untuk mengusulkan secara resmi untuk mengajukan hak bertanya itu kepada pemerintah.

"Itu hak yang tidak bisa dilarang karena memang melekat pada anggota. Saya berpendapat memang tidak perlu, tetapi juga tidak melarang. Silakan menggunakan mekanismenya, diusulkan, kalau sudah memenuhi syarat akan ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, secara



PRIYO BUDI SANTOSO

ra prinsip sebenarnya lebih tepat jika DPR melakukan pengawasan atas rekomendasi penyerahan masalah itu ke KPK. Apalagi, dalam kasus Hambalang, KPK juga sudah melakukan penyidikan. "Tetapi apa yang direkomendasikan BAKN, di mana salah satunya adalah agar DPR mengguna-

kan hak menyatakan pendapat, juga harus dihargai," ujarnya.

Untuk itu, Priyo memperlakukan anggota DPR yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya itu untuk menempuh mekanisme yang ada. Jika mau, ujarnya, semua anggota BAKN yang ikut dalam menyusun rekomendasi atas telaah audit BPK itu menjadi inisiator. "Jika sesuai persyaratan sudah terpenuhi, nanti akan dibawa ke Bamus untuk dijadwalkan pengambilan keputusan di paripurna," paparnya.

Anggota BAKN DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Teguh Juwarno mengatakan, untuk menjadi inisiator hak interpelasi kasus Hambalang bukan masalah berani atau

tidak, melainkan lebih pada menunggu bagaimana respons fraksi-fraksi dan juga pimpinan DPR dalam menyikapi apa yang telah direkomendasikan oleh BAKN. "Menunggu hasil rapim DPR, bagaimana keputusan mereka. Juga Panja Hambalang di Komisi XDPR," kata Teguh.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, saat ini fraksinya sedang melakukan kajian atas rekomendasi BAKN. "Sudah dibentuk tim di fraksi untuk mempelajari hak interpelasi yang direkomendasikan oleh BAKN," katanya. FPKS, ungkapnya, tidak akan terburu-buru menggunakan hak konstitusional tersebut.

●rahmat sahid